

3. Penerapan otonomi daerah guna memberikan wewenang seluas-luasnya untuk menjalankan roda pemerintahan agar daerah tersebut bisa mandiri dalam menggali potensi daerah tersebut.

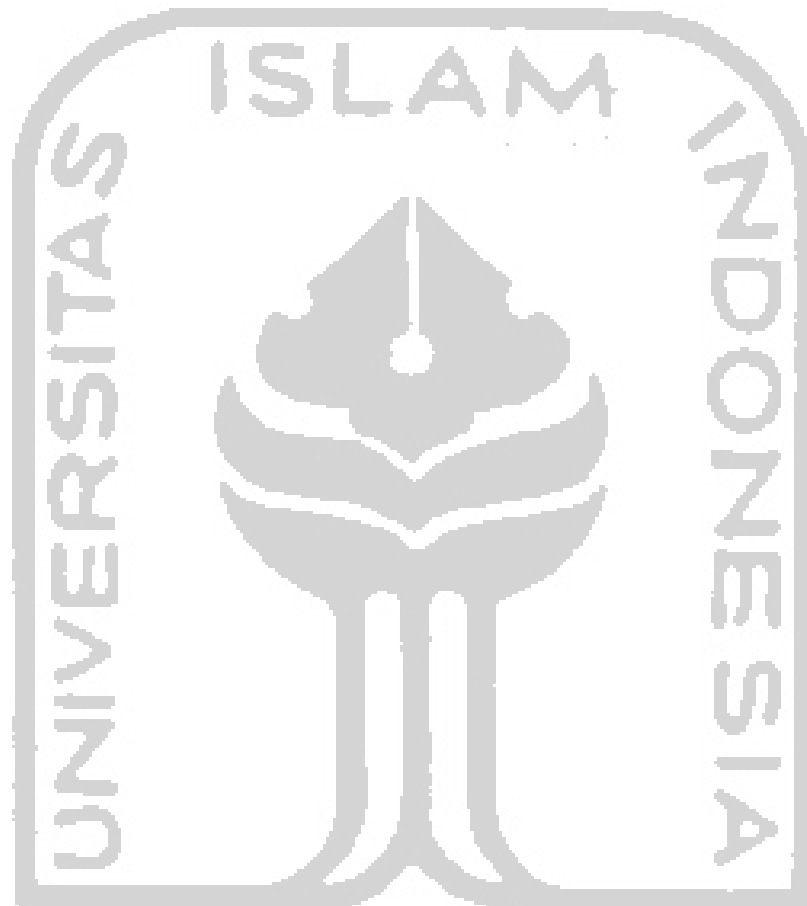
DAFTAR PUSTAKA

- Nurhuda, R. (2013). Analisis ketimpangan pembangunan (studi di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 110-119.
- Ginting, A. M. (2014). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia.
- Maulana, A. (2019) ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTARKABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 1-6.
- Ilham, M., & Pangaribowo, E. H. (2017). Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011–2015. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4).
- Badan Pusat Statistika, 2013. Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum. BPS Pusat
- _____. 2014. Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum. BPS Pusat
- _____. 2015. Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum. BPS Pusat
- _____. 2016. Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum. BPS Pusat
- _____. 2017. Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum. BPS Pusat
- _____. 2018. Statistik Indonesia 2018. BPS pusat.
- Badan Pusat Statistik Indonesia.2017. “Listrik yang Didistribusikan Menurut Provinsi (Gwh) Tahun 2013-2017”.Indonesia

- Badan Pusat Statistik Indonesia.2017. “*Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Miliar Rupiah) Tahun 2006-2017*”.Indonesia
- Badan Pusat Statistik Indonesia.2017. “*Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi (Juta US\$) Tahun 2006-2017*”. Indonesia
- Badan Pusat Statistik Indonesia.2017. “*Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2013-2017*”. Indonesia
- Badan Pusat Statistik Indonesia.2018. “*Produk Domestik Bruto (Milyar Rupiah) Atas Harga Konstan 2010 Tahun 2011-2018*”. Indonesia
- Raafi'i, A., Hakim, D. B., & Putri, E. I. K. (2018). Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(3), 244-257.
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1).
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan ekonomi indonesia: determinan dan prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44-55.
- Rosmeli, R. (2018). Dampak Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(1), 79-84.
- Bhattacharyya, S., & Hodler, R. (2014). Do natural resource revenues hinder financial development? The role of political institutions. *World Development*, 57, 101-113.
- Silalahi, S. A. F. (2014). Kondisi Industri Manufaktur Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 1-13.
- Sukirno, S. (2008). *Mikro ekonomi. Teori pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sumadiasa, I. K., Tisnawati, N. M., & Wirathi, I. G. A. P. (2016). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik dan PMA terhadap

Provinsi	INDEKS WILLIAMSON
----------	-------------------



Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2014. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(7).

Todaro, M.P., & Smith, S. C. (terj.) 2006, *pembangunan Ekonomi/Edisi Kesebelas/Jilid 1*. Erlangga, Jakarta.

Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI PROVINSI ACEH. *TATALOKA*, 21(1).

LAMPIRAN 1

Lampiran 1. Indeks Williamson Tahun 2013-2017